

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Piutang PBB Kota Bekasi Mencapai Rp 439 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kota Bekasi
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.10
Edisi	: Sabtu, 29 September 2018

Piutang PBB Kota Bekasi Mencapai Rp 439 Miliar

BEKASI, (PR).-

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi akan memaksimalkan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu upaya menutupi kebutuhan keuangan Pemkot Bekasi saat ini.

Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhandi mengungkapkan, hingga batas akhir pembayaran PBB yang jatuh pada 10 September 2018, sebanyak 406.000 wajib pajak belum

memenuhi kewajiban.

"Setelah dikalkulasi, piutang yang tertunggak oleh para wajib pajak tersebut mencapai Rp 439 miliar. Itu sudah dengan perhitungan denda sebesar 2% sebab pembayaran PBB selepas tanggal 10 September 2018," katanya, Kamis (27/9/2018).

Untuk penagihan piutang PBB ini, Bapenda menerbitkan surat penagihan yang akan dilayangkan kepada wajib pajak mulai 1 Oktober 2018. Untuk

keperluan penagihan, 398 pegawai Bapenda diterjunkan hingga ke tingkat RW dan RT.

Para camat dan lurah juga turut diberdayakan. Kepada para wajib pajak dengan utang dalam jumlah besar, penagihan dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. "Tetapi, wajib pajak besar—berupa perusahaan—tak terlalu banyak. (Piutang PBB) yang lebih dominan ialah wajib pajak pribadi," tuturnya.

Aan mengakui, pihaknya gagal memenuhi target perolehan PBB secara maksimal sebelum jatuhnya batas akhir pembayaran. Hal itu lantaran prinsip PBB menunggu kesadaran tiap-tiap wajib pajak.

Selama masa pembayaran, pihaknya sekadar menggencarkan sosialisasi guna merangsang kesadaran masyarakat untuk segera membayar kewajiban. "Masyarakat harus terus diingatkan. Namun, karena kini

sudah lewat batas waktu, akhirnya kami melakukan penagihan," ujarnya.

Jadi andalan

Ia berjanji, dalam sisa waktu tiga bulan, pihaknya akan menggenjot penerimaan PBB ini melalui penagihan tersebut. Target sebesar 80% dari potensi piutang pun dipatok untuk dapat direalisasikan.

"Setiap tahunnya, target PAD selalu bisa tercapai. Tahun ini

juga akan kami upayakan semaksimal mungkin," katanya.

Menurut dia, PBB memang bukan satu-satunya sektor yang masih rendah realisasi perolehannya. Ada juga pajak dari sektor reklame yang realisasinya juga masih jauh dari harapan.

Pemasukan dari sektor reklame ini, disebut Aan, baru terrealisasi sekitar 24% dengan raihan Rp 9 miliar. Selain reklame, pendapatan dari sektor pajak restoran juga belum

memenuhi target. "Tetapi, kalau pajak restoran dan BPHTB sampai saat ini masih berjalan. Jadi, kami tetap optimistis capaiannya di akhir tahun nanti bisa sesuai harapan," katanya.

Untuk sektor reklame yang capaiannya belum menggembirakan, Aan mengaku pihaknya belum akan fokus ke sana. "PBB masih jadi andalan kami sehingga fokus ke sana dulu," katanya. **(Riesty Yusnilningsih)*****